

Dampak Penerapan Perdirjen Pajak Nomor Per-32/PJ/2011 Mengenai *Transfer Pricing* Di PT. OKM Yang Memiliki Transaksi Dengan Perusahaan Afiliasi Dari Luar Negeri

ABSTRAK

Penelitian mengenai dampak penerapan peraturan direktur jenderal pajak nomor per-32/pj/2011 pada PT. OKM ini dilakukan karena begitu berkembangnya isu mengenai transfer pricing di masyarakat. Peraturan direktur jenderal pajak nomor per-32/pj/2011 merupakan perubahan dari ketentuan sebelumnya, yaitu peraturan direktur jenderal pajak nomor per-43/pj/2010. Peraturan ini membahas mengenai penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi yang memiliki hubungan istimewa. Prinsip kewajaran dan kelaziman usaha itu sendiri merupakan pedoman bagi perusahaan yang melakukan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa seperti yang terjadi pada PT. OKM. Pada prinsip kewajaran dan kelaziman usaha ini perusahaan diwajibkan untuk melakukan analisis kesebandingan dan kemudian menentukan metode transfer pricing yang tepat. Dalam hal ini PT. OKM menetapkan metode *comparable uncontrolled price* dalam transaksinya pada pihak afiliasi semenjak diberlakukannya peraturan direktur jenderal pajak nomor per-32/pj/2011. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas dari penerapan peraturan direktur jenderal pajak nomor per-32/pj/2011 pada PT. OKM yang melakukan transaksi dengan perusahaan afiliasi dari luar negeri. Metode yang dipakai pada penelitian ini adalah metode kualitatif, hasil analisis dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa PT. OKM telah menerapkan peraturan direktur jenderal pajak nomor per-32/pj/2011 dengan baik. Dimana penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha telah sesuai dengan ketentuan, selain itu metode *transfer pricing* pun telah ditentukan dengan tepat dan diaplikasikan secara efektif. Untuk itu pada periode – periode selanjutnya diharapkan PT. OKM tetap mematuhi peraturan direktur jenderal pajak nomor per-32/pj/2011 selama belum dilakukan perubahan, agar efektifitas yang telah terbentuk tetap berjalan optimal dan terhindar dari sanksi – sanksi yang akan memberatkan PT. OKM bilamana melanggar ketentuan tersebut.

Kata kunci: *peraturan direktur jenderal pajak nomor per-32/pj/2011, hubungan istimewa.*

